

# PROBLEMATIKA POLITIK SEKTARIANISME DI LEBANON DAN DINAMIKA POLITIK REGIONAL

**Indriana Kartini**

*Peneliti bidang Politik Internasional,  
Pusat Penelitian Politik LIPI  
Email : indriana.kartini@gmail.com*



## Abstract

Lebanon has faced sectarian problem in its political, economics, social, and cultural life. Confessionalism system that become its national identity has made difficulties for the country to escape from sectarianism problem. Lebanon constitution has ordained confessionalism system by acknowledging many religious sects in the country. This system is hoped to answer the question of cultural and political identity of Lebanon. However, there are differences between Muslim and Christian communities in viewing nationality of Lebanon. Muslim elites identify themselves with Arab nationalism and inspired by establishing national sovereignty in unification with Syria. While Christians inspired by Lebanon sovereignty through Lebanon-Phoenicia identity and Western face. This article will examine problems of sectarianism politics in Lebanon by analysing the relations between political Islam and other power (Christians) in the country. This article will also examine the regional and international political dynamics that influencing Lebanese politics.

**Keywords** : sectarianism, regional, politics, Lebanon

**M**araknya sektarianisme di Dunia Arab pasca *Arab Spring* menandai rapuhnya identitas sektarian. Dalam konteks ini, khususnya di Bahrain, Yaman, dan Suriah, gerakan protes yang awalnya berjalan damai berubah menjadi kontestasi sektarian dan kesukuan yang dimainkan oleh rezim penguasa. Identitas sektarian merupakan konstruksi sejarah, dimana intensitas dan sentralitasnya terhadap mobilisasi politik, didasarkan pada konteks politik, ideologis, dan geopolitis. Lebih lanjut, model mobilisasi politik sektarian ini terjadi akibat lemahnya negara dan kekosongan ideologi dominan di negara tersebut. Di seluruh Dunia Arab, faktor sektarian, kesukuan, agama, dan afiliasi etnis berkembang luas karena runtuhnya negara akibat invasi AS ke Irak pada 2003, dan juga diakibatkan oleh militerisasi dan sektarianisasi pasca *Arab Spring*.

Lebanon merupakan salah satu negara di Dunia Arab yang tidak pernah lepas dari persoalan sektarianisme dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem konfesionalisme yang dianut Lebanon dan menjadi identitas nasional, mengakibatkan negara tersebut sulit melepaskan diri dari problematika sektarianisme. Sistem konfesionalisme ini secara normatif menjamin kesetaraan jumlah kursi di parlemen berdasarkan jumlah sekte di Lebanon serta Pakta Nasional yang menentukan pembagian jabatan presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen berdasarkan sekte (presiden berasal dari Maronit, PM berasal

dari Sunni, dan ketua parlemen berasal dari Syiah).

Sejak berdirinya Lebanon Raya pada 1920 dibawah mandat Prancis, agama dan politik saling berpilin dan menjadi gambaran dominan yang menentukan identitas sekaligus sistem politik negara tersebut. Konstitusi Lebanon tahun 1926 telah mentahbiskan sistem konfesionalisme dengan mengakui berbagai sekte/aliran keagamaan di negara tersebut. Terdapat 18 sekte di Lebanon, antara lain : sekte Muslim (Sunni, Syiah, Druze dan Alawiyah) dan sekte Kristen (Maronit, Romawi Orthodox, Romawi Katolik, Armenia Orthodox, Armenia Katolik, Evangelis Kristen, Evangelis Latin, Orthodox Yunani dan Katolik Yunani, Orthodox Suriah, Katolik Suriah, Evangelis, Koptik) dan Yahudi.<sup>1</sup> Disaat yang sama, pasal 7 dari Konstitusi Lebanon mengakui bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama, dan pasal 9, menjamin penghargaan terhadap status hukum personal dan kepentingan agama, serta pasal 10, memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memutuskan pilihan pendidikan mereka.<sup>2</sup> Konstitusi inilah yang memberikan basis konfesionalisme bagi Lebanon.

Sistem konfesionalisme yang dibangun atas dasar pengakuan terhadap berbagai aliran keagamaan ini diharapkan

1 Wawancara dengan Dr. Mohamed Chamsedine, International Information, Research Consultants, di Lebanon, pada 8 Maret 2016.

2 "Lebanese Parliament", dalam <http://www.lp.gov.lb/SecondaryAr.aspx?id=12>, diunduh pada 2 September 2016.

mampu menjawab pertanyaan mengenai identitas dan orientasi politik Lebanon. Namun demikian, terdapat perbedaan visi kebangsaan dan kenegaraan diantara kalangan Muslim dan Kristen. Secara general, para elit Muslim mengidentifikasi diri mereka dengan nasionalisme Arab dan terinspirasi untuk mewujudkan kedaulatan nasional dalam kerangka penyatuan dengan negara Suriah. Sementara kalangan Kristen terinspirasi oleh kedaulatan Lebanon dengan penekanan pada identitas Lebanon-Fenisia<sup>3</sup> dan wajah Barat.

Platform politik nasional kemudian dibentuk menyusul kemerdekaan Lebanon dari Prancis pada 1943 dengan menyatukan berbagai sekte dan dikenal dengan sebutan Pakta Nasional *al-Mithaq al-Watani* yang mendeklarasikan bahwa "Lebanon adalah negara independen dengan wajah Arab". Bagi kalangan Kristen, Lebanon secara geografis adalah bagian dari Dunia Arab, tapi tidak otomatis sebagai negara Arab, sementara kalangan Muslim, mengasumsikan bahwa faktor ke-Arab-an Lebanon merupakan fakta sejarah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pakta Nasional ini merupakan solusi kompromi antara pendukung Lebanisme dan Arabisme. Pakta

Nasional ini sekaligus menghasilkan formula *power-sharing* yang disusun berdasarkan hasil sensus 1932,<sup>4</sup> dimana rasio Muslim atas Kristen adalah 5:6 dalam birokrasi negara dan jabatan presiden diberikan kepada Kristen Maronit. Presiden mendominasi institusi politik, keamanan, keuangan, dan yudikatif. Hak prerogatif presiden ini ditambah dengan kontrol Maronit atas pos keamanan dan militer negara. Kelompok Maronit mengepalai Dirjen Keamanan Negara, the Lebanese Armed Forces (LAF), dan Direktorat Intelijen Militer dari LAF. Untuk mengurangi ketakutan kalangan Kristen atas marginalisasi dalam dunia Muslim Arab, rasio Kristen atas deputi Muslim di parlemen adalah 6:5.<sup>5</sup>

Pakta Nasional yang menjadi perekat kesatuan bangsa dan negara kemudian runtuh tatkala Lebanon jatuh dalam perang saudara sejak 1975-1990. Pakta Nasional kemudian hanya menjadi ilusi ketika negara tersebut terpecah belah berdasarkan garis sektarian dan Beirut muncul sebagai wilayah pertempuran dalam konflik Arab-Israel dan militansi Palestina. Setelah hampir dua dekade Lebanon mengalami perang

3 Bangsa Fenisia hidup di wilayah Timur Tengah, di pantai Timur Laut Mediterania yang sekarang termasuk wilayah Lebanon. Bangsa Fenisia yang sejatinya berasal dari daerah Kanaan merupakan bangsa pelaut terbesar di zaman kuno dan orang-orang Timur Tengah kuno pertama yang menjalin hubungan dengan bangsa Eropa. Pelabuhan Fenisia di kawasan Levant adalah Ugarit, Sidon, Byblos, dan Beritus (Beirut). Pelabuhan utamanya adalah Tirus yang dipercaya didirikan pada 4.750 tahun lalu.

4 Sensus tahun 1932 merupakan sensus terakhir yang secara resmi dilaksanakan di Lebanon dimana secara demografis, total populasi Kristen lebih besar dari Muslim dan Kristen Maronit sebagai mayoritas. Dalam perkembangannya, total populasi Muslim kemudian berubah melebihi populasi Kristen. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor bagi kalangan Muslim untuk menggugat sistem *power sharing* lama yang berujung pada disepakatinya Taif Accord.

5 Lihat Bab 2 "A Political History of Sectarian Institutions", dalam Bassel F Salloukh dkk, *The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon*, (London: Pluto Press, 2015), hlm. 17.

saudara, akhirnya pada 1990 atas desakan dari Arab Saudi dan Suriah, disusul lah kompromi konstitusional “*The Document of National Understanding*” yang dikenal dengan nama Taif Accord yang membantu mengakhiri perang saudara. Taif Accord mengamandemen konstitusi sekaligus Pakta Nasional dan mendeklarasikan bahwa Lebanon adalah negara Arab dan tanah air bagi seluruh warganya.

Konstruksi sejarah tersebut signifikan untuk memahami problematika politik sektarianisme di Lebanon yang menjadi fokus kajian ini. Selanjutnya, tulisan ini akan menganalisis bagaimana relasi kekuatan politik Islam dengan kekuatan politik lainnya di Lebanon. Se-

lain itu, tulisan ini menganalisis dinamika politik regional dengan menganalisis intervensi aktor regional dan internasional dalam politik Lebanon.

### Dinamika Politik Sektarianisme Pasca Perang Saudara

Pasca perjanjian Taif Accord, terjadi perubahan *power-sharing* yang salah satunya dilandasi oleh perubahan demografis dimana total populasi Muslim melebihi total populasi Kristen (lihat tabel 1). Perubahan demografis ini terjadi antara lain disebabkan oleh kedatangan pengungsi Palestina ke Lebanon akibat pendudukan Israel.

**Tabel 1.**  
Persentase Populasi Kristen dan Muslim : 1913-2011

Tahun	1913	1932	1975	2011
Kristen				
Maronit	58,3	28,8	23	19,313
Orthodok Yunani	12,6	9,8	7	6,75
Katolik Yunani	7,7	5,9	5	4,375
Lain-lain	0,8	6,8	5	4,292
Total Persentase	79,4	51,3	40	34,9
Muslim				
Syi'ah	5,6	19,6	27	29,375
Sunni	3,5	22,4	26	29,375
Druze	11,4	6,8	7	5,479
Total Persentase	20,5	48,8	60	65,1

**Sumber :** Bab 2 “A Political History of Sectarian Institutions”, dalam Bassel F Salloukh dkk, *The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon*, (London: Pluto Press, 2015), hlm.14.

Redistribusi kekuatan politik pasca Taif Accord merefleksikan pendekatan pragmatis terhadap perubahan demografis Lebanon dan keseimbangan militer sektarian. Faksi militer Maronit, baik yang ada di Lebanese Forces maupun dari kubu Jenderal Michel Aoun di LAF, terpecah akibat konflik internal. Taif Accord juga mengakibatkan meningkatnya kekuatan politik dan militer komunitas Syiah, dan posisi Suriah sebagai wasit dalam urusan dalam negeri Lebanon. Sebagai cerminan dari keseimbangan kekuasaan domestik dan regional, Taif mengubah keseimbangan kekuasaan eksekutif dari presiden Maronit, menjadi kekuasaan kolektif dalam Dewan Menteri (*the Council of Ministers*). Dewan Menteri ini, yang dibangun atas koalisi besar sekte, menjadi pemelihara otoritas eksekutif yang riil. Hal ini memberikan kekuasaan kepada Perdana Menteri dari kalangan Sunni, yang saat ini menjadi

institusi independen, dimana sebelumnya kekuasaan eksekutif dikuasai penuh oleh presiden. Sebaliknya, presiden hanya berperan sebagai “wasit” (tokoh penengah) nasional tanpa syarat prerogatif konstitusional.<sup>6</sup>

Selain itu, Taif Accord ini memperkuat kekuasaan parlementer atas eksekutif, sehingga kabinet tidak dapat membubarkan parlemen. Dalam hal ini, kekuasaan ketua parlemen dari kalangan Syiah meningkat *vis-a-vis* kabinet dan majelis parlemen. Ketua parlemen juga berperan penting dalam seleksi perdana menteri dan pemilihan presiden. Oleh karena itu, ketua parlemen, bersama dengan presiden dan perdana menteri merupakan aktor utama dalam membentuk kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Tabel 2 berikut menggambarkan redistribusi kekuasaan berdasarkan garis sektarian di Lebanon.

**Tabel 2.**  
Distribusi Kekuasaan di Lebanon  
Berdasarkan Garis Sektarian

Maronit	Sunni	Syiah	Ortodok Yunani	Druze
Presiden	Perdana Menteri	Ketua Parlemen	Deputi Perdana Menteri	Kepala Staf LAF
Komandan LAF	Dirjen <i>Internal Security Forces</i>	Direktur dan Deputi Direktur Kemanan Umum	Gubernur Beirut	Deputi II Gubernur bank Sentral

6 *Ibid.*, hlm. 22.

Kepala Direktorat Intelijen LAF	Deputi II Direktorat Intelijen LAF	Deputi I Direktorat Intelijen LAF	Dirjen Dewan Pembangunan dan Rekonstruksi	Kepala Pengadil-an Polisi
Gubernur Bank Sentral	Dirjen Kementerian Kehakiman	Dirjen Kementerian Ekonomi	Kepala Dana Sentral bagi pengungsi	Dirjen Kementerian Kesehatan
Ketua Dewan Pengadil-an Tinggi	Jaksa Agung	Wakil Presiden Dewan Pembangunan dan Rekonstruksi	Dirjen Kementerian Tenaga Kerja	Dirjen Kementerian Pengungsi
Ketua Dewan Konsultatif Negara	Presiden Dewan Pembangunan dan Rekonstruksi	Direktur Keamanan Sosial	Kepala Pusat Pendidikan untuk Penelitian dan Pengembangan	Gubernur (wilayah) Selatan
Dirjen Kementerian Keuangan	Dirjen Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat (altrenates with Maronite)	Presiden Dewan (Wilayah) Selatan		
Presiden Dewan Konstitusional	Deputi III Gubernur Bank Sentral	Kepala Auditor		
Presiden <i>Casino du Liban</i>	Dirjen Kepresidenan	Direktur Bank Keuangan		
Dirjen Kementerian Pendidikan	Presiden Dewan PNS	Gubernur Nabatiye		
Dirjen Pajak	Gubernur Pegunungan Lebanon	Kepala Unit Keamanan Kedutaan		
Wakil Presiden Dewan Pembangunan dan Rekonstruksi		Dirjen Kementerian Dalam Negeri dan Kotamadya		

**Sumber :** Bab 2 “A Political History of Sectarian Institutions”, dalam Bassel F Salloukh dkk, *The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon*, (London: Pluto Press, 2015), hlm.24.

Beberapa dekade pasca Taif Accord, terdapat dua visi bernegara yang berbeda dan saling berkompetisi dari kalangan Muslim, yang menggambarkan dinamika internal dan kepentingan regional. Visi pertama diwakili oleh seorang pengusaha sukses, Rafiq Hariri, yang kemudian menjadi PM Lebanon dengan dukungan kuat dari Arab Saudi dan Barat, yang mempertaruhkan perdamaian di Timur Tengah untuk membangun negara kosmopolitan. Visi kedua, yang diwakili oleh partai Syiah, Hizbullah, yang didukung oleh Iran, menganggap Lebanon sebagai garda depan perlawanan terhadap Israel dan juga Barat. Kompetisi antara keduanya berada di bawah pengawasan Suriah, yang kemudian diterima oleh Barat sebagai kekuatan penyeimbang.<sup>7</sup>

Meskipun pasca Taif Accord terjadi perubahan formula *power-sharing* yang lebih merata, namun hal ini tidak mengarah kepada perubahan positif seperti stabilitas politik yang *genuine*, tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau debat terbuka mengenai bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan utama akibat ketiadaan kebijakan jangka panjang nasional yang memfokuskan pada kepentingan publik. Sebaliknya, Lebanon kembali mengalami krisis politik pasca pembunuhan Rafiq Hariri pada Februari 2005, disusul dengan dihapusnya pengaruh Suriah yang ditandai dengan mundurnya pasukan Suriah dari Lebanon. Pasca mundurnya Suriah, Hizbul-

lah mengambil posisi defensif, karena dikenal sebagai kelompok pro Suriah. Namun, Hizbullah tetap memiliki pengaruh mengingat resistensinya terhadap penjajahan Israel, mobilisasi Syiah, ambisinya untuk mengubah sistem pasca Taif Accord, dan perannya dalam kebangkitan gerakan Islam di tingkat regional.<sup>8</sup>

Peristiwa pembunuhan Rafiq Hariri menandai perubahan konstelasi politik nasional dan regional. Di level nasional, politik sektarian Lebanon terbagi menjadi dua koalisi politik yang pro dan anti Suriah, yakni aliansi 14 Maret dan 8 Maret. Aliansi 14 Maret yang anti Suriah muncul sebagai gerakan protes atas pembunuhan Hariri. Pada 14 Maret 2005, sejumlah 1,5 juta rakyat Lebanon turun ke jalan melakukan demonstrasi masal menuntut mundurnya Suriah dari Lebanon. Peristiwa bersejarah ini dikenal dengan sebutan "Cedar Revolution". Kelompok yang tergabung dalam aliansi 14 Maret antara lain Future Movement (Mustaqbal) (kelompok Sunni pimpinan Saad Hariri, putera Rafiq hariri) yang menjadi motor koalisi, Jamaah Islamiyah, Haiah Ulama Muslim, Progressive Socialist Party (PSP) (kelompok Druze pimpinan Walid Jumlat, putera Kamal Jumlat), Free Patriotic Movement (FPM), (kelompok Maronit pimpinan Jenderal Michel Aoun), Lebanese Forces (kelompok Maronit pimpinan Samir Geagea), dan Kataeb Party (Lebanese Phalangist Party pimpinan Amine Gemayel).

7 Riad al-Khoury, "The Future of Democracy in Lebanon", UNISCI Discussion Papers, No.12 (Oktober 2006).

8 *Ibid.*

Sementara itu, aliansi 8 Maret muncul sebagai koalisi pro Suriah, yang melakukan demonstrasi di pusat kota Beirut untuk menyampaikan rasa terima kasih terhadap Suriah yang berperan menghentikan perang saudara di Lebanon. Sebagai aliansi tandingan 14 Maret, koalisi 8 Maret terdiri atas Hizbullah (kelompok Syiah pimpinan Hasan Nasrallah) yang menjadi motor koalisi, AMAL Movement (kelompok Syi'ah pimpinan Nabih Berri), dan Al Ahbash pimpinan Adnan Trabulsi. Dalam perkembangannya, kedua aliansi mengalami perubahan formasi, dimana terdapat kelompok yang berpindah aliansi, seperti FPM yang sebelumnya tergabung dalam aliansi 14 Maret kemudian beralih ke aliansi 8 Maret pada tahun 2006 dan PSP yang termasuk salah satu motor aliansi 14 Maret juga beralih ke aliansi 8 Maret pada 2011. Perpindahan dua kekuatan politik ini dianggap menguntungkan Hizbullah dan aliansi 8 Maret.

### **Pertarungan Partai Politik Islam dalam Pemilu Parlemen**

Partai-partai politik Islam seperti Jamaah Islamiyah dan Hizbullah berpartisipasi dalam pemilu parlemen 1992 berdasarkan pertimbangan praktis ketimbang ideologis. Kedua partai tersebut mendasarkan diri pada pengalaman sebagai pendiri dan mengorganisasikan jaringan institusi sosial yang besar sehingga mampu melakukan kampanye efisien dan menjangkau banyak wilayah perkampungan. Meskipun Ja-

maah Islamiyah masuk dalam pertarungan pemilu tanpa bantuan dari sekutu luar, namun tiga kandidatnya berhasil memenangkan kursi parlemen, seperti Fathi Yakan untuk Lebanon Utara di Tripoli; As'ad Harmouch untuk Lebanon Utara di al-Dinniyeh; dan Zuhair al-'Abidi di Beirut. Kemenangan ketiga kandidat tersebut tidaklah mudah, namun mereka diuntungkan oleh aksi boikot yang dilakukan kandidat Kristen, khususnya di wilayah Beirut. Sementara Hizbullah, melakukan kampanye pemilu yang praktis dan politis, menempatkan kandidat-kandidatnya dalam "coalition list" (daftar koalisi), "complete list" (daftar lengkap), dan sebagai independen. Di dapil Baabda, di Gunung Lebanon, Hizbullah berkoalisi dengan *Progressive Socialist Party* (PSP) pimpinan Walid Jumblat; di Beirut melakukan "undeclared coalition" dengan *the Islamic Society of Philanthropic Project*; dan di selatan melakukan "coalition list" dengan AMAL pimpinan Nabih Berri. Hizbullah dan pendukungnya kemudian memenangkan 12 kursi di parlemen, dan membentuk blok terbesar di parlemen.<sup>9</sup>

Seriring dengan meningkatnya kekuatan politik dan militer Hizbullah, partai-partai seperti AMAL dan PSP beralih mendukung kubu Presiden Hariri, yang berseberangan dengan Hizbullah. Pada pemilu parlemen 1996, Hizbullah menjadi target dari kubu

<sup>9</sup> Robert G. Rabil, *Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon: The Challenge of Islamism*, khususnya Bab 6, "The Praxis of Islamism and Syrian Suzereinty", hlm. 90.

pendukung Presiden Rafiq Hariri yang ingin melucuti kekuatan Hizbullah. Aliansi tripartit antara Hariri, Beri, dan Jumblat mengakibatkan Hizbullah hanya mendapatkan dua kursi, satu di Beirut dan satu di Gunung Lebanon. AMAL pimpinan Berri dan Hizbullah pimpinan Nasrallah saling memobilisasi aliansi mereka. Jamaah Islamiyah di Sidon, the Syrian Social Nationalist Party-Higher Council, the Communist Party, dan mantan ketua parlemen, Kamil al-As'ad mendukung Hizbullah. Sementara Partai Ba'th, the Syrian Social Nationalist Party-Ali Qanso, dan kubu Hariri mendukung AMAL. Pertarungan kedua partai Syi'ah tersebut mencapai eskalasi, hingga Suriah campur tangan dengan memanggil Nasrallah ke Damaskus. Akhirnya, Hizbullah dan partai pendukungnya bergabung dalam "coalition list" dengan AMAL dan memenangkan 10 kursi di parlemen.<sup>10</sup>

Tidak seperti Hizbullah, Jamaah Islamiyah terpuruk dalam pemilu 1996, dengan hanya memenangkan 1 kursi di utara Lebanon. Bahkan, kandidat mereka memperoleh suara terendah diantara kandidat Sunni lainnya yang terpilih. Meskipun kekalahan ini merefleksikan lemahnya dukungan warga terhadap Jamaah Islamiyah, namun faktor bertarungnya kembali partai Kristen dalam pemilu 1996, dimana pada 1992 partai Kristen memboikot pemilu, turut mengurangi kesempatan Jamaah Islamiyah untuk menang. Selain itu, kampanye

besar-besaran kubu Hariri dan kompetisi antara Jamaah Islamiyah dan Al-Ahbash menjadi faktor yang juga berperan mengurangi prospek Jamaah Islamiyah dan mengancam posisi politik partai tersebut.<sup>11</sup>

Pada pemilu 2000, kesepakatan Taif Accord benar-benar diabaikan, dimana Lebanon dibagi menjadi 14 daerah pemilihan. Di bawah pengawasan kepala intelijen Suriah, pembagian dapil ini menciptakan daerah-daerah yang diperuntukkan bagi kandidat-kandidat pro Suriah, yang menyatukan daerah-daerah yang tidak terhubung dengan perbedaan demografis yang besar. Secara khusus, praktik *gerrymandering* yang menggabungkan daerah-daerah yang berisi denominasi satu sekte dengan daerah yang lebih luas yang berisi denominasi mayoritas tunggal dari sekte lainnya. Praktik ini menghilangkan suara-suara anti Suriah, khususnya dari kelompok Maronit.<sup>12</sup> Pada pemilu kali ini, Hizbullah berhasil memenangkan 12 kursi di parlemen, dengan mengkampanyekan keberhasilannya dalam mengusir Israel dari perbatasan Lebanon. Partai-partai yang pada pemilu 1996 sebelumnya sempat berupaya mengurangi kekuatan Hizbullah, beralih mendukung kandidat dari Hizbullah dan turut masuk dalam "coalition list" bersama Hizbullah. Namun, kubu Hariri berhasil memperoleh kursi terbanyak, khususnya di Beirut.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>12</sup> Robert G. Rabil, "Lebanon: At the Crossroads between Democracy and Rogue State", *Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch 1004*, (17 Juni 2014).

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 91.

Sementara Jamaah Islamiyah harus kehilangan satu-satunya kursi yang didapat dari dapil Lebanon Utara.

Sementara itu, dipicu kemarahan akibat pembunuhan terhadap PM Rafiq Hariri pada 4 Februari 2005, yang diduga didalangi oleh Suriah, komunitas Sunni bergabung dalam kubu yang dipimpin oleh putra Rafiq Hariri, yakni Saad Hariri. Keluarga Hariri yang menggunakan peristiwa pembunuhan tersebut untuk menggalang kesatuan nasional, berupaya menjadi *focal point* rekonsiliasi nasional dan memosisikan dirinya sebagai pusat politik Lebanon. Sementara komunitas Syiah yang dipimpin oleh Hizbullah yang pro Suriah, berupaya mengklaim peranan politiknya dengan dalih kekuatan demografis yang dimilikinya. Dengan dikeluarkannya Resolusi PBB 1559, Hizbullah khawatir dengan posisinya sebagai gerakan Resistansi mengingat salah satu poin yang diatur dalam Resolusi tersebut adalah perlucutan senjata Hizbullah di Lebanon. Hizbullah juga menyadari bahwa kelompoknya dapat menjadi target komunitas internasional, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, Hizbullah memainkan dua kebijakan ganda, yakni 1), mengkooptasi komunitas lain atas nama kesatuan nasional dan 2), memanfaatkan pemilu, baik sebagai referendum atas peranannya sebagai gerakan Resistansi, maupun sebagai ajang untuk menunjukkan kekuatan politiknya.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan kebijakan pertama, Hizbullah mendorong rekonsiliasi politik dengan mendekati faksi-faksi Kristen, yang selama ini bersuara keras menuntut perlucutan senjata Hizbullah. Berkaitan dengan kebijakan kedua, Hizbullah melakukan aliansi dengan AMAL, PSP, dan Future Movement membentuk "Quadripartite alliance". Dalam aliansi tersebut, Hizbullah memberikan kesempatan kepada Future Movement pimpinan Saad Hariri dan PSP pimpinan Walid Jumblatt untuk memperoleh kursi mayoritas di parlemen sebagai imbalan atas jaminan bahwa mereka tidak akan mengusik gerakan resistansi dan senjata yang dimiliki Hizbullah. Pemilu 2005 kemudian menghasilkan 4 pemimpin yang mewakili komunitas masing-masing, yakni Saad Hariri (faksi Sunni), Walid Jumblatt (faksi Druze), Hassan Nasrallah (faksi Syiah), dan Michel Aoun (faksi Kristen). Sementara itu, Jamaah Islamiyah yang kalah dalam pemilu 2000, memboikot pemilu parlemen 2005, dengan dalih bahwa campur tangan internasional meningkat dan peran finansial menjadi faktor signifikan dalam proses elektoral. Namun, dalih tersebut tampaknya hanya untuk menutupi perpecahan yang terjadi di dalam tubuh partai Islam tersebut. Sebelum hari pemilihan berlangsung, mantan deputi Jamaah Islamiyah, Zuheir al-'Abidi mengunjungi Michel Aoun pemimpin *Free Patriotic Movement* (faksi Kristen) untuk menunjukkan dukungannya. Namun,

13 Robert G. Rabil, *Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon: The Challenge of Islamism*, khususnya Bab 6, "The Praxis of Islamism and Syrian

Suzereinty", hlm. 101.

mantan deputy Politbiro Jamaah Islamiyah, Asa'd Harmouch menyatakan bahwa kunjungan tersebut bersifat personal bukan mengatasnamakan partai. Bahkan, Sekjen partai Syekh Faisal Mawlawi tidak mengakui kunjungan tersebut.<sup>14</sup>

Pada pemilu 2009, koalisi 14 Maret pimpinan Saad Hariri kembali memenangkan pemilu parlemen dengan perolehan 71 kursi, sementara koalisi 8 Maret pimpinan Hizbullah memenangkan 57 kursi (lihat tabel 3).

Meskipun koalisi pimpinan Hizbullah mengalami kekalahan,

namun Hizbullah berhasil memenangkan 11 kursi di seluruh dapil yang diikutinya. Sekjen Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah mengakui kekalahan koalisi 8 Maret dan memberikan selamat kepada seluruh pemenang dan menegaskan bahwa oposisi akan terus berada di parlemen dan tidak akan melakukan boikot. Nasrallah juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara "popular majority" dengan "parliamentary majority", bahwa mayoritas warga Lebanon tetap mendukung gerakan Resistansi meskipun koalisi 8 Maret mengalami kekalahan.<sup>15</sup>

**Tabel 3.**  
Hasil Pemilu Parlemen 2009 di Tingkat Distrik

Daerah Pemilihan	Hasil Pemilu 2009		Perolehan suara dari Koalisi 14 Maret dan 8 Maret di tingkat distrik
Utara	25	3	228.300/131.892
Utara Gunung Lebanon	2	14	92.969/107.367
Selatan Gunung Lebanon	12	7	133.013/87.855
Beirut	17	2	112.734/53.300
Selatan	2	21	51.650/297.571
Beqa'a	13	10	96.976/176.286

**Sumber :** Diolah dari Information International – The 2009 Lebanese Parliamentary Election by Polling Stations, Candidates and Sects, dalam *The Monthly*, Issue No.161, Desember 2015.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>15</sup> Chris Harnisch, "2009 Lebanese Parliamentary Elections", dalam [http://www.criticalthreats.org/lebanon/2009-lebanese-parliamentary-elections#\\_edn-ref18](http://www.criticalthreats.org/lebanon/2009-lebanese-parliamentary-elections#_edn-ref18), diunduh pada 21 Oktober 2016.

Namun yang pasti, kemenangan koalisi 14 Maret menunjukkan bahwa koalisi mereka lebih koheren dan bersatu, sementara koalisi 8 Maret gagal membentuk front politik bersama dengan satu program politik.<sup>16</sup>

Pemilu parlemen selanjutnya yang sejatinya dilakukan pada tahun 2014, mengalami penundaan. Pada 31 Mei 2013, parlemen hasil pemilu 2009 memperpanjang mandatnya hingga 17 bulan karena terjadi *deadlock* mengenai UU pemilu. Kemudian, pada 5 November 2014, parlemen kembali memperpanjang masa jabatannya, menambah 31 bulan, hingga 20 Juni 2017. Selain alasan adanya ketidaksepakatan atas UU pemilu, situasi perang di Suriah juga menjadi pertimbangan parlemen untuk menunda pemilu, karena hal tersebut berpengaruh pada persaingan antar partai.<sup>17</sup> Krisis politik di Lebanon juga semakin diperparah oleh penundaan pemilihan presiden, dimana sejak 2014 hingga penelitian ini dilakukan, Lebanon belum memiliki presiden baru, sebagai akibat tidak adanya kesepakatan diantara partai-partai mengenai kandidat presiden. Meskipun faksi Kristen diwakili FPM pimpinan Michel Aoun, mendesak diadakannya pemilihan presiden.

16 Doreen Khoury, "The Lebanese Parliamentary Elections, A Surprise, but No real Change- Statehood and Participation", dalam <https://lb.boell.org/en/2014/03/03/lebanese-parliamentary-elections-surprise-no-real-change-statehood-participation>, diunduh pada 21 Oktober 2016.

17 "Lebanese Parliament Extends Own Term Till 2017 amid protests", dalam <http://www.reuters.com/article/us-lebanon-parliament-idUSKBN01P18T20141105>, 5 November 2014, diunduh pada 21 Oktober 2016.

## Dinamika Politik Regional: Lebanon sebagai Arena Pertempuran

Konflik bersenjata antara milisi Lebanon di sekitar Beirut, bukan satu-satunya konflik di negeri Lebanon yang menarik perhatian Presiden Suriah Hafiz Assad di akhir 1970an dan awal 1980an. Warga Palestina yang mengungsi di Lebanon juga terlibat dalam serangan lintas batas terhadap perkampungan Israel dekat perbatasan Lebanon yang seringkali direspons Israel dengan serangan militer. Dalam pertemuan Liga Arab di Kairo pada 3 November 1969, organisasi PLO pimpinan Yasser Arafat diberi lampu hijau untuk melancarkan operasinya dari wilayah Lebanon. Pemerintah Lebanon saat itu, tidak memiliki pilihan untuk menolak membuka akses bagi para pejuang Palestina karena dapat berakibat pada alienasi Lebanon oleh negara-negara Arab dan meluasnya pertentangan antara Muslim-Kristen di negaranya. Meskipun Assad tidak bersahabat dengan Yasser Arafat, karena Arafat tidak mau mengintegrasikan gerakan perlawanannya dengan arah kebijakan rezim Suriah, namun Assad memberikan apresiasi atas tekanan yang dilakukan PLO terhadap tentara Israel di Selatan Lebanon. Aksi PLO ini bagi Assad dapat memberikan jalan bagi Assad dan elit Lebanon pro-Suriah untuk mengalahkan faksi Kristen pro-Israel yang terlibat dalam perang saudara yang terjadi di Utara Lebanon.<sup>18</sup>

18 Lihat Judith Palmer Harik, *Hezbollah: The Changing Face of Terrorism*, (London : IB Tauris & Co Ltd, 2005), khususnya Bab 2, "Hezbollah and the Outside World",

Sementara itu, Israel berupaya mengatasi persoalan dengan PLO melalui pendekatan terhadap warga Kristen dan Syiah yang tinggal di Selatan Lebanon yang keberatan dengan kehadiran pengungsi Palestina, atau warga yang tetap tinggal di wilayah tersebut dan tidak bergabung dengan kekuatan bersenjata melawan Israel. Milisi lokal yang dinamakan *the Southern Lebanese Army* (SLA), pimpinan Saad Haddad - seorang Kristen yang pernah bergabung dengan pasukan bersenjata Lebanon - ini dipersenjatai untuk memukul pasukan PLO sekaligus melindungi perbatasan Israel di utara. Puncaknya pada 1982, terjadi invasi Israel secara masif di Lebanon. Tel Aviv mengklaim bahwa invasi tersebut dilakukan untuk mengakhiri aksi terorisme di wilayah tersebut. Namun, akademisi Israel, seperti Schiff dan Yaari membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa motif utama dari invasi Israel adalah ambisi partai sayap kanan, Likud, untuk menghancurkan resistansi dari Suriah dan PLO dan menancapkan Pax Israeli secara unilateral di wilayah tersebut, termasuk penggabungan Tepi Barat dan Jalur Gaza kedalam Israel Raya.<sup>19</sup> Dalam operasi yang dinamakan "Peace for Galilee" di bawah komando Menteri Pertahanan Israel, Ariel Sharon, pasukan Israel memasuki kota Beirut dengan harapan dapat menghancurkan pasukan Palestina yang didukung sekutu Muslim, dan melakukan perjanjian dengan se-

kutu Kristen Israel untuk menghasilkan perjanjian damai antara Israel - Lebanon. Jika skenario ini terjadi, maka Suriah dapat dipukul mundur dari Lebanon.

Tujuan dari strategi Israel tersebut tidak tercapai akibat perlawanan dari kelompok oposisi pro-Suriah dan pembunuhan terhadap tokoh pro-Israel, pemimpin partai Phalangis (Kataeb), Bashir Gemayel, sebulan setelah dirinya terpilih sebagai presiden Lebanon. Impian perjanjian damai Israel-Lebanon pupus sudah pasca pembunuhan Gemayel. Di masa hidupnya, Gemayel menginginkan negeri Lebanon bersih dari orang-orang Palestina dan mengubah sistem politik Lebanon secara radikal demi keuntungan kelompok Kristen. Selain itu, pertempuran di Barat Lebanon dan pendudukan Israel telah mengakibatkan radikalisasi beberapa kelompok Syiah, dan membawa kepada kerjasama kelompok Syiah dengan Suriah dan Iran untuk melawan pasukan Israel.<sup>20</sup>

Sebagai respons atas terbunuhnya Bashir Gemayel, milisi pendukung partai Phalangis (Kataeb) kemudian melakukan aksi balas dendam dengan melakukan pembantaian di kamp pengungsi Palestina di wilayah pinggiran Beirut, di kampung Sabra dan Shatila. Antara 16 - 18 September 1982, sekitar 1.500 orang, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak, termasuk hewan, dibunuh secara keji. Aksi pembantaian tersebut diyakini dilakukan oleh milisi Phalangis atas perintah dari pasukan Ariel Sharon.

hlm. 34.

19 Zeev Schiff dan Ehud Yaari (eds), *Israel's Lebanon War*, (New York: Simon & Schuster, 1984).

20 Judith Palmer Harik, *oap.cit*, hlm. 35.

Akibat dari aksi keji tersebut, ratusan warga Lebanon dan warga sipil Palestina mengalami penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan selama 3 hari, dan banyak pula warga yang ditahan namun tidak kembali lagi. Diperkirakan 2.000 warga sipil tewas dan hilang dalam operasi tersebut.

Pasca peristiwa Sabra dan Shatila, empat pasukan internasional, termasuk 1.400 pasukan Angkatan Laut AS, di-datangkan ke Beirut untuk mengatasi kekacauan dan mengevakuasi pejuang Palestina ke Tunisia atas restu pemerintah Tunisia. Upaya pemulihan situasi akhirnya menemui kegagalan. Pada Desember 1982, misi Amerika tersebut menjadi berubah tatkala kapal perang AS Virginia, menembaki pasukan koalisi Muslim yang diklaim AS melakukan provokasi terhadap pasukan Lebanon. Mengingat pasukan Lebanon bekerjasama dengan milisi Kristen, aksi ini dipandang oleh media lokal Lebanon sebagai akhir netralitas AS dalam perang saudara di Lebanon. Bagi warga Lebanon, strategi pasukan AS yang awalnya untuk mengevakuasi pejuang Palestina berubah menjadi intervensi dalam perang saudara yang dipandang berpihak kepada kelompok Kristen. Sebagai respons atas keberpihakan Amerika, terjadi peristiwa pengeboman di Kedubes AS di Beirut, pada 18 April 1983, yang menewaskan 63 jiwa. Kemudian, pada Oktober 1983, 243 pasukan marinir AS tewas dalam ledakan truk di barak militer dekat bandar udara internasional. Tak lama kemudian, gedung tempat tinggal

pasukan Prancis yang tergabung dalam pasukan multinasional juga diledakkan dan menewaskan puluhan orang. Tidak ada individu maupun kelompok yang mengklaim bertanggungjawab atas aksi pengeboman tersebut, namun disinyalir bahwa aksi tersebut dilakukan oleh kelompok militan Muslim yang didukung oleh Iran dan atau Suriah.<sup>21</sup>

### Intervensi Internasional dalam Politik Lebanon

Penandatanganan perjanjian Taif Accord 1989 menandai berakhirnya perang saudara di Lebanon. Sejak saat itu, rakyat Lebanon mulai berbenah diri dari kekacauan yang terjadi selama 15 tahun. Namun, mengingat Lebanon merupakan negara lemah, maka intervensi kekuatan regional dan internasional seringkali mewarnai perpolitikan Lebanon. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan para elit politik Lebanon untuk mencapai konsensus atas persoalan nasional sehingga membuka jalan bagi intervensi para aktor regional dan internasional.<sup>22</sup>

Pasca penandatanganan Taif Accord, Suriah menjadi kekuatan hegemon yang menjadi faktor penentu dalam setiap keputusan politik di Lebanon hingga 2005. Bahkan bisa dikatakan bahwa periode 1989 hingga 2005 merupakan periode pendudukan Suriah di Lebanon. Untuk melancarkan kepentingan Suriah

21 *Ibid*, hlm. 36.

22 Wawancara dengan Rami el-Rayess, Senior Media Officer of Progressive Socialist Party dan Editor in Chief Al-Anbaa Newspaper, 14 Maret 2016 di Beirut, Lebanon.

di Lebanon, rezim Assad menggunakan Hizbullah untuk menekan Israel guna merebut kembali Dataran Tinggi Golan dan mengurangi gerakan oposisi di Lebanon.

Dalam hal ini, pemerintah Suriah menerapkan beberapa aturan untuk mengatur hubungan antara negara/pemerintah, kekuatan politik Lebanon, dan Hizbullah, antara lain: 1) menempatkan tokoh politik pro-Suriah dalam institusi negara dan pasukan bersenjata; 2) kabinet akan mengeluarkan tokoh politik anti-Suriah, dan Damaskus tetap mempertahankan kekuatan vetonya atas portfolio pemerintahan yang strategis seperti kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian luar negeri; 3) kepala intelijen Suriah di Lebanon akan mengawasi pemilu dan melakukan praktik *gerrymandering* di daerah pemilihan guna mengontrol pelaksanaan pemilu<sup>23</sup>; 4) Hizbullah akan memimpin operasi militer melawan Israel dan mendapat dukungan implisit dari pemerintah Lebanon; 5) Baik Hizbullah maupun pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan senjata untuk menyerang satu sama lain. Jika konflik terjadi, Damaskus akan menjadi pihak penengah; 6) Partai politik di Lebanon boleh mewujudkan tujuan politik mereka asalkan tidak bertentangan dengan kebijakan Suriah; 7) Tanpa persetujuan Damaskus, tidak ada satupun partai politik yang dibolehkan menggunakan

kekuatan eksternal untuk melaksanakan agenda politik mereka; 8) Hizbullah dapat mengkapitalisasi peran resistansi dan bantuan finansial dari Iran untuk mewujudkan agenda politiknya, namun hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan partai politik pro-Suriah, yakni AMAL.<sup>24</sup>

Sebelum periode hegemoni Suriah, intervensi internasional juga dapat dicermati dalam pemilihan presiden pertama di Lebanon. Berdasarkan UU Pemilu Lebanon, rakyat tidak memilih presiden, namun wakil rakyat di parlemen menetapkan calon presiden berdasarkan kesepakatan antar kelompok di parlemen. Misalnya, pada tahun 1943, ketika terjadi kesepakatan antara sejumlah kekuatan politik, dimana Inggris mengangkat Bishara Al-Khury (Maronit) sebagai presiden. Meskipun Prancis juga memiliki calon presiden sesuai preferensinya, namun berdasarkan kesepakatan, Inggris yang berhak menetapkan Al-Khury sebagai presiden pertama Lebanon pasca kemerdekaan. Oleh karena itu, ketika anggota parlemen melakukan pemilihan presiden, sudah diketahui siapa pemenangnya berdasarkan kesepakatan.<sup>25</sup>

Kemudian pada tahun 1952, terjadi kesepakatan antara AS dan Mesir dalam pemilihan presiden Lebanon dengan ter-

24 Robert G. Rabil, *Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon: The Challenge of Islamism*, khususnya Bab 6, "The Praxis of Islamism and Syrian Suzereinty", hlm. 71.

25 Wawancara dengan Dr. Mohamed Chamsedine, International Information, Research Consultants, di Lebanon, pada 8 Maret 2016.

23 Wawancara dengan Michel de Chadarevian, ketua komite politik, Partai Free Patriotic Movement, di Beirut, pada 9 Maret 2016.

pilihnya Camille Chamoun (Maronit). Pada masa itu, Pan Arabisme tengah menguat di bawah kepemimpinan Presiden Gamal Abdel Nasser dan mendapat dukungan kuat dari kelompok Muslim Lebanon. Begitupula dengan terpilihnya presiden Lebanon Suleiman Franjeh dari partai Marada (Maronit) pada 1962, tidak terlepas dari campur tangan AS dan Mesir. Kemudian, pada masa kekuasaan Suriah di Lebanon, pemerintah Suriah memiliki kewenangan untuk mengangkat Elias Sarkis sebagai presiden Lebanon pada 1976. Begitupula dalam pemilihan presiden Emile Lahoud pada 1998, terjadi kesepakatan antara Suriah dan AS. Kemudian, ketika dilangsungkan Perjanjian Doha, terjadi kesepakatan di bawah naungan Qatar dengan terpilihnya Michel Suleiman sebagai presiden pada 2008.<sup>26</sup> Perjanjian Doha dilakukan atas inisiasi Emir Qatar, Syaikh Hamad bin Khalifa Al Thani, untuk menyelesaikan krisis politik dan mencegah perang saudara kedua di Lebanon, dengan mengundang seluruh partai politik Lebanon ke Doha.

Sementara itu, menyikapi kekosongan kursi presiden Lebanon sejak 2014, kemungkinan hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan antara dua negara, yakni Iran dan Arab Saudi serta kekuatan politik Lebanon.<sup>27</sup> Dalam hal ini, terjadi tarik-menarik kepentingan antara Arab Saudi dan Iran. Pihak Arab

Saudi, yang diwakili kubu Saad Hariri (Future Movement) dari koalisi 14 Maret, mengajukan Suleiman Franjeh Jr pemimpin partai Marada sebagai calon presiden. Sementara Iran, diwakili kubu Hizbullah dari koalisi 8 Maret, menginginkan Michel Aoun pemimpin partai FPM sebagai calon presiden.<sup>28</sup> Akibat tarik-menarik kepentingan tersebut, dalam sidang pada 13 Juli 2016, parlemen Lebanon gagal untuk ke-42 kali berturut-turut dalam memilih presiden baru akibat kurangnya kuorum. Hanya 37 anggota parlemen yang mengikuti sidang, sementara untuk mencapai kuorum, harus diikuti oleh dua pertiga dari 128 kursi di parlemen.<sup>29</sup> Akibat situasi politik tersebut, roda pemerintahan Lebanon mengalami kepincangan dan menambah lemahnya institusi negara karena dijalankan tanpa jabatan presiden. Hal ini terjadi karena masih terdapat kelompok politik yang berkepentingan menunda terpilihnya seorang presiden.

Namun, akhirnya kekosongan politik di Lebanon berakhir dengan terpilihnya Michel Aoun sebagai Presiden pada 31 Oktober 2016. Kemenangan Aoun yang didukung oleh kubu Hizbullah menunjukkan bahwa koalisi 8 Maret lebih kuat dibanding koalisi 14 Maret dalam konteks perebutan kursi presiden.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, dan Wawancara dengan Dr. Imad El Hout, anggota parlemen Lebanon, wakil dari Partai Jamaah Islamiyah, di Beirut, 10 Maret 2016.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Dr. Mohamed Chamsedine, International Information, Research Consultants, di Lebanon, pada 8 Maret 2016.

<sup>29</sup> "Lebanon Gagal Pilih Presiden Baru", dalam <http://www.antaraneews.com/berita/573096/lebanon-gagal-pilih-presiden-baru>, 14 Juli 2016, diunduh pada 23 September 2016.

## Penutup

Bagi rakyat Lebanon, Arab Spring bukanlah suatu fenomena baru, karena mereka telah mengalami fenomena sama pada tahun 2005, yakni Revolusi Cedar untuk mengakhiri hegemoni Suriah di Lebanon. Revolusi Cedar menjadi momentum politik bagi Lebanon untuk mengakhiri intervensi asing dalam kehidupan sosial politik Lebanon. Namun sayangnya, revolusi tersebut justru menciptakan dikhotomi antara kelompok politik pro Suriah dan anti Suriah, yang diwakili oleh dua blok politik, yakni koalisi 14 Maret dan 8 Maret. Pertarungan politik dalam pemilu parlemen sejak 2005 hingga kini senantiasa diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan kedua kubu tersebut yang tidak jarang mengakibatkan krisis politik di Lebanon yang tidak berkesudahan. Pertentangan antara koalisi 14 Maret yang dimotori oleh Future Movement (Partai Mustaqbal) pimpinan Saad Hariri dan 8 Maret yang dimotori oleh Hizbullah, secara tidak langsung mencerminkan pertentangan antara kelompok politik Islam Sunni dan Syiah. Bahkan jika ditarik ke dalam ranah politik internasional, melibatkan dua kekuatan regional di belakang kedua kubu tersebut, yakni Arab Saudi yang mendukung Future Movement dan Iran yang mendukung Hizbullah. Akibatnya, persoalan politik di Lebanon yang sejatinya diselesaikan melalui konsensus antar kekuatan politik mengalami kebuntuan, karena adanya intervensi kekuatan regional di belakangnya.

Dalam konteks kekuatan politik Is-

lam di Lebanon, dua kelompok politik (Mustaqbal dan Hizbullah) berperan penting dalam menentukan masa depan politik Lebanon. Dalam konteks politik sektarianisme, sebenarnya kedua kelompok tersebut sepakat untuk mengurangi bahkan menghilangkan sistem politik konfesionalisme yang bagi mereka tidak adil. Mengingat pertimbangan demografis bahwa populasi Muslim yang kini melebihi populasi Kristen, maka menurut pandangan mereka kurang layak jika jabatan presiden tetap diberikan kepada kelompok Kristen Maronit.<sup>30</sup> Selain itu, sistem konfesionalisme juga dipandang tidak mampu menciptakan rasa nasionalisme bagi rakyat Lebanon. Seperti diungkapkan oleh Dr. Imad El Hout, anggota parlemen dari Jamaah Islamiyah:

*"We as Jamaah Islamiyah think that it is a bad system. Perhaps the coalition or the agreement between minorities. Because this do not allow to create what I said national feeling, you have always to be pushed to have Sunni feeling, Syiah feeling, Christian feeling but not Lebanese. So it will not create a nation. If we stay all the time the coalition of minority will have always been in conflict"*.<sup>31</sup>

30 Wawancara dengan Dr. Imad El Hout, anggota parlemen Lebanon, wakil dari Partai Jamaah Islamiyah, di Beirut, 10 Maret 2016; Wawancara dengan Dr. Ali Fayad, anggota parlemen Lebanon dari Partai Hizbullah, di Beirut, pada 11 Maret 2016; wawancara dengan Syekh Dr. Abdul Naser Jabri, Dekan Kuliyyah Dakwah Islamiyyah, Beirut, Lebanon, pada 12 Maret 2016; dan wawancara dengan Prof. Dr. Rafaat Miqati, Vice President of Tripoli University, di Tripoli, pada 13 Maret 2016.

31 Wawancara dengan Dr. Imad El Hout, anggota parlemen Lebanon, wakil dari Partai Jamaah Islamiyah, di Beirut, 10 Maret 2016.

Senada dengan El Hout, Prof. Dr. Hilal Khasan dari American University of Beirut, menyebut Lebanon sebagai “a state without nation”. Tidak ada nasionalisme Lebanon, yang ada hanyalah “polarize nationalism”.<sup>32</sup> Namun demikian, guna menghindari terjadinya kembali perang saudara di Lebanon, mau tidak mau, kelompok politik Islam harus tetap menghormati Pakta Nasional yang membagi kekuasaan diantara kelompok Islam dan Kristen di Lebanon.

Sementara itu, bagi kelompok Kristen, penghapusan sistem konfesionalisme tentunya akan mengancam eksistensi dan privilese politik mereka. Kekhawatiran akan hilangnya privilese

politik itu semakin besar karena mereka merupakan minoritas di Dunia Arab serta akibat perkembangan politik regional, khususnya konflik di Irak, Mesir dan Suriah. Dimana dalam konflik di negara-negara tersebut, terjadi pembunuhan terhadap tokoh politik Kristen, penghancuran gereja (di Irak pasca invasi AS tahun 2000); aksi vandalisme terhadap gereja di Mesir, serta kemenangan partai-partai Islam di beberapa negara. Oleh karena itu, koeksistensi antara kelompok Islam dan Kristen di Lebanon serta komitmen terhadap Pakta Nasional tampaknya menjadi keniscayaan demi terciptanya persatuan dan kesatuan nasional di Lebanon. []

---

32 Wawancara dengan Prof. Dr. Hilal Khasan, Political Science Department Chair, American University of Beirut, di Beirut, pada 10 Maret 2016.